



Strategy of the Department of Cooperatives and Small Business of North Sumatra Province in the Development of Cooperatives in North Sumatra

Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengembangan Koperasi di Sumatera Utara

Saidah Ulfah Pohan¹⁾; Marliyah²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: ¹⁾ saidahulfah2020@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [6 April 2022]

Revised [13 April 2022]

Accepted [17 April 2022]

KEYWORDS

Cooperative, UMKM,
Development

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Pengembangan koperasi adalah hal yang sesuai dengan identik pengembangan ekonomi kerakyatan. Kesejahteraan masyarakat luas dan bersama merupakan dasar dari pengembangan koperasi Indonesia. Metode penelitian ini adalah Metode deskriptif disini ialah yang berusaha mengungkapkan fakta aktual yang di hadapi oleh pelaku koperasi di wilayah sumatera utara. Koperasi dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang antara lain, terjelma dalam pemerataan pendapatan di masyarakat melalui pertumbuhan koperasi-koperasi yang sehat. Koperasi digerakkan agar distribusi dari pemilikan assets (kekayaan) dan kesempatan berusaha dalam masyarakat diperbaiki secara fungsional dan terus menerus. Bahkan sementara ahli mengatakan koperasi sebagai gerakan yang berperan untuk turut mempercepat proses capital ownership reform.

ABSTRACT

The development of cooperatives is in accordance with the identical development of the people's economy. The welfare of the wider community and together is the basis of the development of Indonesian cooperatives. This research method is a descriptive method, which is an attempt to reveal the actual facts faced by cooperative actors in the North Sumatra region. Cooperatives are developed to realize economic democracy which, among other things, is manifested in the distribution of income in the community through the growth of healthy cooperatives. Cooperatives are driven so that the distribution of ownership of assets (wealth) and business opportunities in society is improved functionally and continuously. Even some experts say that cooperatives are a movement that plays a role in accelerating the process of capital ownership reform.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sebagian besar adalah usaha mikro, kecil dan menengah bahkan salah satu lembaga survei menyatakan kekayaan harta empat orang terkaya setara dengan seratus juta orang termiskin, kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, sama dengan gabungan kekayaan seratus juta orang termiskin (DW.com). selain itu BPS jawa barat mengungkapkan sensus ekonomi pada tahun 2016 bahwa presentasi UMK nonpertanian menurut status usaha, 98,84 persen usaha mikro kecil dan 1,16 persen (persentase UMK nonpertanian menurut status usaha, 2016) adalah usaha menengah besar.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki nilai yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional, bisa dilihat dari intensitas dalam menciptakan tenaga kerja yang relative lebih tinggi dari pada investasi. Sehingga UMKM memberikan kemudahan dalam menghadapi dan mudah beradaptasi dengan perubahan pasar (Bambang Agus Sumantri, 2007). UMKM memiliki peran dan strategi dalam mengembangkan perekonomian nasional. Selain mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga mendistribusikan ekonomi pembangunan nasional, sehingga sudah membuktikan bahwa UMKM tidak berpengaruh pada masa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan mampu tetap berdiri kokoh (husein, 2009).

Konsep pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas merupakan salah satu metode dan strategi yang digunakan dalam penguatan ekonomi masyarakat dalam perlawanan terhadap dominasi korporasi dan ekonomi pasar bebas yang berpaham individualis, eksploitatif, dan bertumpu pada kekuatan modal model ini menitikberatkan pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang dikelola secara kolektif yakni, bertumpu pada kekuatan anggota komunitas dengan azas mutualisme dan kekeluargaan. Manifestasi kerangka konseptualnya kedalam bentuk kelembagaan ekonomi yang lebih teknis dan operasional, menemukan format yang sesuai pada koperasi sebagai media dan alat perjuangan ekonomi berbasis masyarakat.

Pengembangan koperasi adalah hal yang sesuai dengan identik pengembangan ekonomi kerakyatan. Latar belakang sejarah perkoperasian nasional maupun global menunjukkan bahwa koperasi adalah institusi yang diciptakan untuk melindungi kaum miskin yang lemah. Kata koperasi dan rakyat adalah dua kata kunci yang melekat sangat erat. Kata rakyat dipakai untuk menghindari anggapan bahwa gerakan koperasi bersifat elitis. Penggunaan kata tersebut memang memunculkan kesan dikotomis, yakni membedakan dengan tegas perekonomian rakyat dengan sektor usaha besar (konglomerat). Akan tetapi, pada konteks tertentu, pendekatan dikotomis seperti itu memang dibutuhkan demi efektifnya upaya koperasi melindungi anggota-anggotanya dari penghisapan oleh kalangan elit ekonomi. Perlindungan terhadap anggota koperasi dilakukan dengan cara memperkuat posisi tawar anggota-anggota koperasi secara bersama (*collective bargaining*) dalam melakukan transaksi ekonomis dengan pihak lain. Posisi tawar kolektif itu cukup berpengaruh dalam upaya mengkonkretkan sumber daya potensial para anggota, dan untuk mencapai kesejahteraan para anggota maupun masyarakat sekitarnya (Ismawan, 2001).

Koperasi dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang antara lain, terjelma dalam pemerataan pendapatan di masyarakat melalui pertumbuhan koperasi-koperasi yang sehat. Koperasi digerakkan agar distribusi dari pemilikan *asset* (kekayaan) dan kesempatan berusaha dalam masyarakat diperbaiki secara fungsional dan terus-menerus. Bahkan sementara ahli mengatakan koperasi sebagai gerakan yang berperan untuk turut mempercepat proses *capital ownership reform*. Karena koperasi muncul sebagai *countervailing power* atau *balance wheel* (roda pengimbang) terhadap kapitalisme yang tak terbandung. Rasanya untuk Indonesia lebih dari itu, koperasi akan berperan sebagai *substantive power* (kekuatan substantif) dalam sistem perekonomian.

Koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi yang memacu efisiensi juga memiliki *social content*. Isian atau watak sosial itu, antara lain, ditandai oleh beragam kegiatan koperasi yang selain memekarkan sinergi (perpaduan yang memberikan surplus yang berganda) untuk perbaikan mutu kehidupan ekonomi juga meningkatkan *social benefit* (manfaat sosial) yang berporos pada upaya buat menggerakkan kesejahteraan bagi para anggotanya maupun masyarakat umum.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan.

Koperasi pertama kali di perkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

Konsep koperasi

Munkner dari University of Marburg, Jerman Barat membedakan konsep koperasi menjadi dua: konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pada dasarnya, perkembangan konsep-konsep yang ada berasal dari negara-negara barat dan negara-negara berpaham sosialis, sedangkan konsep yang berkembang di negara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut.

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan di bentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Usaha kecil

Pengertian yang pertama dikemukakan oleh M. Tohar. Beliau mengatakan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang, atau berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1995 kategori usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00; (tidak termasuk tanah dan bangunan); penjualan paling banyak Rp. 1000.000.000,00; milik warga negara Indonesia, bukan afiliasi badan usaha lain (berdiri sendiri), dan berbentuk usaha perorangan, badan usaha, atau koperasi.



Peran koperasi dalam lingkup ekonomi

Kesejahteraan masyarakat luas dan bersama merupakan dasar dari pengembangan koperasi Indonesia. Suatu keyakinan yang muncul bahwa koperasi yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kesejahteraan masyarakat luas dapat diwujudkan, antara lain, bila kesengsaraan ekonomis dan derajat hidup kalangan miskin dan lemah dapat dihilangkan. Pengangguran dapat dicegah, distribusi pendapatan dan kekayaan dapat dimekarkan, pemerasan/ eksploitasi ekonomis dapat dihindarkan secara terus-menerus. Kecuali itu perlu ada kepastian iklim usaha ekonomis (*organizational climate*) sehingga hal hal tersebut dapat diwujudkan dari waktu ke waktu secara lebih baik dan berdayaguna melalui penataan *redistribution with growth/* pertumbuhan melalui pemerataan.

Perwujudan itu perlu juga diukur dari waktu ke waktu yang lain. Berkaitan dengan itu, diperlukan kesigapan untuk menemukan tolak ukur atau parameter yang relevan dan tepat. Rasanya soal parameter ini yang sering kurang kita bicarakan secara lebih tuntas.

Latar belakang sejarah perkoperasian membeberkan bahwa lembaga koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan kaum miskin dan lemah. Dalam hal ini, kata koperasi dan rakyat tidak terpisahkan. *Cooperative* dan *people* adalah dua kata kunci yang telah melekat amat erat. Dari literatur kuno maupun modern tentang koperasi sering dijumpai istilah, koperasi kredit yang sering disebut *people's bank*, dan koperasi konsumsi yang kerap disebut *people's buying club*.

Semuanya itu menampakkan bahwa dari latar belakang sejarah serta teori pembentukan koperasi senantiasa dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang miskin dan lemah. Kata *people* dipakai untuk menghindari kesan elite dan juga untuk menunjukkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang melindungi anggota-anggotanya dari penghisapan kalangan elite ekonomis dengan cara memperkuat posisi anggota-anggota koperasi secara bersama dalam melakukan tawar-menawar ekonomis dan memacu peningkatan potensi-potensi ekonomi anggota secara bersama untuk mencapai kesejahteraan para anggota.

Dapat dikatakan pula bahwa koperasi merupakan lembaga usaha bersama yang terdiri dari orang-orang seperti produsen kecil, konsumen kecil/lemah yang bergabung secara sukarela dan menumbuhkan ekonomi tersendiri untuk mencapai tujuan bersama dengan saling mempersatukan dan menukarkan kontribusinya melalui usaha-usaha ekonomi yang bersifat kolektif sehingga merupakan satu-kesatuan yang kuat dan mandiri serta tidak dapat dieksploitasikan oleh lembaga-lembaga atau kekuatan ekonomi lainnya.

Yang spesifik dari koperasi adalah ia menjadi alat bagi kaum lemah dan miskin di negara ini untuk bersatu demi memperkuat kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan usaha-usaha kolektif dengan cara menghilangkan penghisapan/eksploitasi. Berkaitan dengan itu, pembentukan koperasi harus memunculkan antitesis terhadap persaingan yang tidak mendidik antara anggota maupun antarkoperasi menghilangkan persaingan ekonomi antarmereka. Dengan itu pula secara berdaya guna dalam kerja sama mereka akan menunjukkan fungsi-fungsi, proses-proses, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan secara terpadu dengan kepentingan-kepentingan dan perbaikan taraf ekonomi dari para anggotanya.

Kontribusi jaringan koperasi

Sebagai kekuatan substantif dalam sistem perekonomian nasional, koperasi bukan menjadi subsistem dibawah BUMN atau swasta. Dengan kata lain, BUMN dan swasta bukan merupakan suprasistem dari koperasi, tetapi koperasi berdiri sejajar dengan BUMN dan swasta. Hal itu berarti BUMN bukan menjadi suprastruktur dari koperasi, demikian pula perusahaan swasta. Kenyataan ini perlu dikemukakan karna beberapa peraturan ataupun undang-undang yang dikeluarkan, juga perilaku sementara pejabat yang meresmikan koperasi tidak senapas secara praktis dengan pemahaman ini. Dalam hal ini sudah tiba saatnya untuk menjernihkan hal ini secara lebih berdaya guna agar koperasi-koperasi di Indonesia lebih diberi kesempatan yang memadai untuk berkembang. Dalam hal ini sudah tiba saatnya untuk menelaah dan mengoreksi undang-undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan yang bertentangan dengan otonomi koperasi sebagai kekuatan ekonomi yang substantif dalam meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dengan cara memacu solidaritas bersama.

Koperasi pada hakikatnya perlu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB); pendapatan kotor dalam negeri, misalnya 30-40 persen. Meskipun yang terjadi selama ini kontribusi koperasi masih teramat kecil dan belum terlihat akan menjadi besar karena berbagai tangan dan kendala iklim usaha yang belum berpihak secara wajar untuk peningkatan kontribusi itu.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteks nya, yaitu menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang di hadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam “*natural setting*”. Sedangkan penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena.

Metode deskriptif disini ialah yang berusaha mengungkapkan fakta aktual yang di hadapi oleh pelaku koperasi di wilayah Sumatera Utara. Pengungkapan fakta tersebut dilakukan melalui tahapan kegiatan yang meliputi pengumpulan data dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner, mentabulasi data, menganalisis, interpretasi dan membuat kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif disini adalah ingin menggambarkan fakta-fakta tentang strategi usaha kecil dalam pengembangan koperasi serta memberikan gambaran situasi hubungan antar keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan koperasi saat lalu, kini, dan mendatang agaknya menarik perhatian. Antara lain, karena kata koperasi seringkali dikaitkan secara terpadu dengan rakyat (*people*). Beraneka literature koperasi menunjukkan bahwa koperasi sering disebut sebagai *people's business*. Misalnya, dalam beragam bahasan teori koperasi kredit sebagai *people's bank*.

Koperasi dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang antara lain, terjelma dalam pemerataan pendapatan di masyarakat melalui pertumbuhan koperasi-koperasi yang sehat. Koperasi digerakkan agar distribusi dari pemilikan *assets* (kekayaan) dan kesempatan berusaha dalam masyarakat diperbaiki secara fungsional dan terus menerus. Bahkan sementara ahli mengatakan koperasi sebagai gerakan yang berperan untuk turut mempercepat proses *capital ownership reform*.

Berkaitan dengan upaya-upaya pemekaran koperasi itu, presiden Soeharto pada 27 Juli 1986 menekankan: “pembangunan koperasi Indonesia bukanlah hanya merupakan selera presiden sebagai mandataris, tetapi merupakan amanat rakyat, amanat perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan dasar *ideil Pancasila* dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, serta amanat GBHN karena itu mutlak harus kita laksanakan tidak bisa di tawar- tawar lagi.

Disamping itu tidak seorang pun warga negara yang dapat mengelak dari jiwa dan semangat konstitusi dan GBHN. Kita harus yakin, bahwa apa yang di amanatkan konstitusi harus dapat dilaksanakan”.

Aspek strategi pengembangan

Menurut (Siti Arbainah, Jati Handayani, Nikmatuniayah, Muhammad Rois, 2021) strategi pengembangan yaitu:

1. Aspek manajerial meliputi produktivitas, pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek pemodal.
3. Mengembangkan pola kemitraan.
4. Mengembangkan sentra industri kecil dan pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (kelompok usaha bersama); *Kopinkra* (koperasi industri kecil dan kerajinan)

Proses manajemen strategi

Proses manajemen strategi terdiri dari beberapa tahapan, (Fred R. David, 2011) yaitu:

1. Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.
2. Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan.
3. Pengambilan keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget,



mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

4. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi merupakan alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktifitas penilaian yang mendasar, yaitu: peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi saat ini, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil di masa yang akan datang.

Pengembangan koperasi di lingkungan provinsi sumatera utara

Kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman provsu Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si memberi arahan dan membuka rapat koperasi di aula dinas PKP provsu (Rabu, 22/07).

Dalam arahannya Ida Maraiana menyampaikan "kebutuhan akan rumah bagi ASN di lingkungan pemprovsu masih sangat tinggi. Pemerintah pusat saat ini telah membentuk badan pengelola tabungan perumahan rakyat sebagai lembaga penyedia perumahan ASN yang sebelumnya dilakukan oleh bapertarum. Selanjutnya Ida mariana mengharapkan agar koperasi nantinya dapat berperan sebagai penyedia perumahan seperti badan pengelola tabungan perumahan rakyat" Ujarnya.

Sebagai narasumber unggul sitanggung selaku kepala bidang kelembagaan dinas koperasi dan UKM provsu yang menyampaikan bahwa hampir diseluruh kab/kota di sumatra utara belum memanfaatkan kegunaan koperasi, selama ini orientasi koperasi tersebut hanya diseputar kegiatan simpan pinjam sedangkan fungsi koperasi antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupam manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan pereknomian nasional, "koperasi di sumut dalam operasi data sistem (ods) saat ini jumlahnya 11.917 unit, yang di dalamnya termasuk binaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dimasa pandemic COVID-19 hanya 93 umit koperasi yang telah melaksanakan rapat tahunan secara virtual. Jumlah anggota koperasi di sumatera utara yang data ods kurang lebih sekitar 900 ribuan anggota dan dimungkinkan bisa lebih banyak jika pendataannya dilakukan secara lebih detail" ujanya.

Rapat ini juga membahas untuk menggabungkan koperasi dari dinas perkebunan provsu, dinas SDA cipta karya dan tata ruang, dinas PKP provsu, dinas bina marga bina kontruksi provsu, dan dinas lingkungan hidup menjadi satu koperasi sekunder. Diharapkan terciptanya koperasi sekunder. Diharapkan terciptanya koperasi sekunder dari beberapa OPD dapat meningkatkan kemampuan usaha koperasi untuk penyediaan perumahan bagi asn, non asn dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan

1. Pengalokasian prioritas permodalan dalam pembangunan insfratuktur teknologi informasi dan digital marketing.
2. Membuat program desentralisasi dalam hal pembuatan prosedur perizinan, sertifikasi, pelatihan, dan pembimbingan.
3. Pembuatan seminar online dan offline yang diprakarsai oleh UMKM binaan yang taraf bisnisnya sudah tinggi dalam rangka rekrutmen wirausaha baru ninaan dinas.
4. Melakukan sikronisasi program dinas koperasi antar divis dan program daerah dan pemerintahan.
5. Menjalin kontrak dan kerja sama antar Asosiasi pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI), dan perusahaan swasta lainnya.
6. Peningkatan sistem informasi dan pemasaran
7. Menjalin kemitraan dengan pihak ketiga dalam menangani pelatihan teknologi dan pedampingan UMKM dan Koperasi.
8. Mengembangkan jejaring kemitraan dengan lembaga keuangan bank dan non bank
9. Peningkatan sistem mutu produk UMKM dan layanan koperasi
10. Membuat kajian dan analisis dalam mengoptimalkan anggaran pemerintah dalam revitalisasi UMKM dan koperasi.
11. Pelatihan berkala pada peningkatan kualitas aparatur dinas dalam bidang bisnis, teknologi dan inovasi.
12. Mengundang tenaga ahli dalam meningkatkan kualitas dinas dan riset pasar.
13. Melakukan rekrutmen aparatur dinas yang handal dan inovatif.
14. Melakukan sosialisasi dalam penanganan *E-commerce* yang diperuntukkan untuk masyarakat,

- koperasi dan UMKM.
15. Mengadakan rapat besar dengan pemerintah daerah, provinsi dan dewan DPR.

KESIMPULAN DAN SARAN

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dengan kata lain koperasi dapat membantu dan memengaruhi perekonomian negara. Namun dalam praktiknya koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranan secara efektif dan maksimal dikarenakan faktor-faktor yang menghambat perkembangan koperasi seperti keterbatasan di bidang permodalan, daya saing yang lemah dibandingkan badan usaha lainnya, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kurangnya kemampuan tenaga kerja dalam pengelolaan koperasi, pandangan masyarakat yang menganggap koperasi sebagai badan usaha kelas bawah dan masih banyak faktor lainnya.

Untuk itulah dibutuhkan strategi yang dapat mengatasi berbagai masalah tersebut demi terciptanya koperasi Indonesia yang produktif dapat menyejahterakan anggotanya sebagai warga negara. Jika warga kecil di Indonesia saja dapat hidup sejahtera dengan bantuan koperasi maka hal tersebut secara tidak langsung membantu perekonomian Indonesia untuk menyejahterakan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku A. Muri Yusuf, *Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, -Jakarta, 2017.
Buku Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *koperasi: teori dan praktik* –Jakarta Erlangga, 2001.
Buku Thoby Mutis, *pengembangan koperasi: kumpulan dan karangan*, -Jakarta : Grasindo, 1992.
Dispkip.sumutprov.go.id
<http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/401>
<https://seviandiah.wordpress.com/2015/11/26/strategi-pengembangan-koperasi-di-indonesia/>
Jurnal Haris Ahnad Rizal, Maulana Rifai, Gungun Gumilar *strategi dinas*
Jurnal Mastur Mujib Ikhsan, Yudhistira Pradhipta Aryoko, *strategi pengembangan koperasi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat*, 2019.
koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan umkm 2021
Skripsi widya fernanda putri *strategi dinas koperasi dan umkm dalam pengembangan umkm kota medan 2021*